

MODAL HISTORIS DAN IDEOLOGIS EKONOMI NU

Nahdlatul Ulama adalah sebuah gejala yang unik, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia Muslim. Ia adalah sebuah organisasi ulama tradisional yang memiliki pengikut yang besar jumlahnya, organisasi non-pemerintah paling besar yang masih bertahan dan mengakar di kalangan bawah.¹ Bertahannya NU sejatinya sangat ditentukan oleh kemampuan pengikutnya dalam melestarikan ideologi yang dianut dan tingkat penerimaan masyarakat bawah yang masih kuat.

NU tidak lahir langsung jadi, melainkan melalui proses yang cukup panjang. Beberapa organisasi embrio terlebih dulu lahir, seperti Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Tujjar, dan Tashwirul Afkar. Orientasi ulama dalam gerak pendidikan, politik, dan ekonomi yang dibangun para ulama menjelang kelahiran NU ini telah menjadi bukti bahwa apa yang dipikirkan ulama begitu komplis. Tidak sekadar persoalan agama yang hendak dibangun para ulama, tapi juga pendidikan, politik, dan ekonomi.

Sayangnya, persoalan ekonomi yang juga menjadi spirit awal kelahiran NU, justru dalam gerak perkembangan NU seringkali terabaikan. Ekonomi menjadi

wilayah garapan yang tidak begitu dihiraukan oleh NU. Tak heran jika sejak berdirinya hingga sekarang keberhasilan NU dalam membangun sistem ekonomi tidak begitu tampak. NU justru tererosok oleh godaan politik yang menggiurkan dan melupakan pemberdayaan ekonomi jama'ah. Padahal konstituen NU yang terbesar adalah petani, nelayan, dan buruh, yang seringkali menjadi korban penindasan ekonomi.

Melihat Konteks Nahdlatul Tujjar

Nahdlatul Tujjar berdiri tahun 1918, ketika bangsa Indonesia terjajah, sebuah potret penindasan ekonomi yang luar biasa. Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai sumber ekonomi terbesar saat itu dieksploitasi oleh Belanda. Nahdlatul Tujjar lahir sebagai ekspresi para ulama di tiga jalur strategis Jawa Timur, yaitu Surabaya, Kediri, dan Jombang terhadap penindasan ekonomi yang dialami bangsanya. Surabaya adalah sebuah kota perdagangan, kota pelabuhan dan industri yang multi-etnis. Kediri adalah kota tua dan pernah menjadi saksi runtuhnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Kediri sama maraknya dengan Surabaya, sebagai akibat dari kian ba-

¹ Martin van Bruinessen, *Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 3

nyaknya permintaan barang di tengah kondisi perdagangan yang sebagian dikuasai orang-orang Cina.

Secara administratif, Jombang baru didirikan pada tahun 1910, meskipun eksistensinya sudah ada sejak tahun 1880. Jombang merupakan daerah yang dikenal kaya pesantren berikut dengan para ulamanya. Karena itu, tidak heran jika para pendiri Nahdlatut Tujjar sebagian besar adalah para ulama yang berasal dari kabupaten Jombang.

Proses lahirnya Nahdlatut Tujjar diprakarsai oleh 45 saudagar santri yang berada di tiga jalur strategis tersebut. Badan usaha yang didirikan adalah Badan Usaha Al Inan yang bergerak dalam bidang pertanian.² Meski berumur pendek, organisasi ini berhasil menjadi perintis bagi usaha-usaha selanjutnya (meski seringkali gagal/rugi) untuk membangun jaringan kerja sama antar masyarakat Islam tradisional.³

Ada beberapa penjelasan yang dapat dijadikan pijakan dalam memotret kon-

teks lahirnya Nahdlatut Tujjar.

Pertama, secara internal di kalangan kelompok tradisional terjadi persoalan dalam memandang hidup. Banyak orang Islam yang memiliki faham Ahlussunnah Waljamaah, bahkan sebagian ulama waktu itu memaksakan dirinya bersikap tawakal (*tajrid*) tanpa berikhtiar untuk perbaikan kualitas hidup, sehingga akibatnya menjadi orang-orang yang serba tamak dari kaum elite. Banyak juga ulama dan *agniya* (orang kaya) dari kelompok Ahlussunnah Waljamaah tidak memperdulikan tetangga-tetangganya yang lemah agamanya terutama yang lemah pendidikan dan ekonominya. Begitu pula, sebagian besar para santri dan kiai hanya mencukupkan pergumulan terhadap *tafaqquh fid din* dalam batas tertentu dan sama sekali tidak menghiraukan ilmu-ilmu lain, bahkan ada yang mengharamkan sehingga waktu itu ada kesenjangan antara *ulama'uddin* dan cendekiawan muslim Aswaja.⁴

Kondisi ini menegaskan tidak in-

² Lihat teks deklarasi Nahdlatut Tujjar yang diterjemahkan Muhammad Miftah (sumber dokumen PP Lakpesdam NU). Beberapa literatur di bawah ini menyebut secara ringkas tentang Nahdlatut Tujjar; Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 17. Andree Feillard, *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LKiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994), h. 171 dan 173. Abdul Munim DZ, *Tanah yang Dijanjikan: Studi Historis Antropologis Lahirnya Sebuah Desa di Jawa*, (Pustaka Tosemito, 2002), h. 114. M. A. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), h. 199. Kacung Marijan, *Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Khittah 1926*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), h. xvii. Martin van Bruinessen, *Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 38

³ Greg Fealy, "Wahab Chasbullah, Tradisionalisme dan Perkembangan Politik NU" dalam Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatut Ulama-Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 6

⁴ Sahal Mahfudh, "Kata Pengantar" dalam Kacung Marijan, *Quo Vadis NU, Stelah Kembali ke Khittah 1926*, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. xvii

dependennya ulama akibat ketergantungan ekonomi dari orang kaya yang bodoh atau penguasa yang durhaka.⁵ Itu sebabnya, K.H. Hasyim Asy'ari melakukan upaya membangkitkan ulama untuk mengurus persoalan sosial dan ekonomi di samping tugas utamanya menyebarkan ajaran agama Islam.

Faktor yang amat penting lahirnya Nahdlatut Tujjar karena status bumiputera yang selalu kalah dalam akses pendidikan dan kelangsungan pencarian kerja sehingga mereka hanya menjadi buruh toko dan pabrik. Dalam kaitannya dengan siklus kemunduruan ini, maka dapat kita bayangkan bagaimana Nahdliyyin yang berprofesi sebagai petani,⁶ yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan penindasan ekonomi.

Kedua, Nahdlatut Tujjar lahir sebagai akibat atas serangan kaum modernis (Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad) terhadap kantong-kantong NU. Tidak

saja gugatan mereka terhadap praktik agama yang dianggap takhayul, bid'ah, dan khurafat (TBC),⁷ tetapi juga mereka mempertanyakan otoritas dan kompetensi kiai, dan kepentingan ekonomi kiai. Tak dipungkiri, ekspansi yang cepat oleh organisasi-organisasi modernis ke berbagai kota kecil Jawa Timur dan Jawa Tengah telah mengancam basis ekonomi banyak pesantren dan ekonomi keluarga kiai yang mengendalikannya. Kaum modernis terutama berhasil merekrut para pedagang kaya dan tuan tanah yang sebelumnya telah menjadi pendukung material dan keuangan kiai.⁸

Inilah relasi konflik yang telah muncul di kalangan organisasi Islam⁹ di Indonesia, terutama kelompok modernis dan tradisional. Otoritas kiai secara sosial dan agama yang telah lama mapan mulai mendapatkan gugatan dari kelompok-kelompok Islam yang sering disebut "pembaharu".¹⁰

⁵ Lihat teks deklarasi Nahdlatut Tujjar yang diterjemahkan Muhammad Miftah (sumber dokumen PP Lakpesdam NU).

⁶ Jarkom Fatwa, *Sekilas Nahdlatut Tujjar* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 51

⁷ Meskipun tidak mengabaikan konflik-konflik tajam antara kelompok pembaharu dengan kelompok tradisional, Martin van Bruinessen memandang perkembangan internasionallah yang memberikan alasan langsung bagi berdirinya NU. Lihat Martin van Bruinessen, *Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, h. 18

⁸ Greg Fealy, "Wahab Chasbullah, *Tradisionalisme dan Perkembangan Politik NU*", h. 8. Namun, dijelaskan oleh Choirul Anam bahwa pada akhirnya kelahiran NU tetap bukanlah sebagai reaksi dari organisasi modern Muhammadiyah, Al Irsyad apalagi Persis, melainkan didominasi oleh sikap mempertahankan mazhab Ahlussunnah Waljamaah NU yang ditujukan kepada Raja Ibnu Sa'ud. Lihat Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Surabaya: Bisma Satu Surabaya, 1999), h. 59

⁹ Choirul Anam berhasil memotret salah satu perdebatan sebagai bagian dari relasi konflik di masa setelah lahirnya NU antara kelompok modernis dengan tradisional yang disebut sebagai peristiwa "Openbaar Vergadering", 31 Mei 1936 di Gebang, Jawa Barat. Kelompok modernis diwakili oleh A. Hasan (Persis), sedang kelompok tradisional (NU Ciledug) diwakili Masduqi, H. Abdul Khair dan Awad Basir. Masalah yang diperdebatkan adalah masalah khilafiyah seperti soal taqlid, haram

Tak bisa dipungkiri bahwa di kalangan masyarakat Jawa Timur saat itu tengah berkembang polarisasi antara tradisional dan modernis. Sejak awal 1910-an, gerakan modernis berkembang pesat, terutama lewat organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Rivalitas antara dua arus itu berkembang lantaran kalangan modernis mendapat dukungan yang kian meningkat dari dalam benteng kaum tradisional di sepanjang daerah pantai utara dan bagian Timur Jawa.¹¹

Kontestasi keagamaan yang mewarnai khilafiyah di lingkungan ulama ternyata dibungkus pula oleh motif-motif ekonomi sehingga serangan kaum modernis ini hampir menyentuh ke jantung eksistensial ulama, karena hal ini dilakukan secara sporadis menyentuh wilayah keagamaan, sosial-politik, dan ekonomi secara bersamaan.

Ketiga, Nahdlatut Tujjar lahir sebagai reaksi para ulama yang bangkit menantang pergerakan ekonomi kaum

penjajah Belanda. Semangat yang muncul adalah membentengi perekonomian rakyat sebagai tulang punggung bangsa. Sejak diterapkannya *Cultuur Stelsel* alias Tanam Paksa (1830-1870) di bawah kendali pemerintahan Van den Bosch, Belanda mulai merampas tanah-tanah pertanian milik rakyat untuk ditanami komoditas perkebunan yang laku di pasaran Eropa. Petani memang tidak lagi diwajibkan menyerahkan dua perlima hasil buminya, tetapi seperlima dari luas tanahnya wajib ditanami jenis tanaman sesuai dengan keinginan Belanda seperti kapas, nila, kopi, tebu, teh, dan hasilnya menjadi milik pemerintah Belanda untuk diekspor.¹²

Kondisi tersebut makin bertambah parah ketika Tanam Paksa digantikan Politik Liberal¹³ tahun 1870-1900 yang membuka pintu bagi investor asing di sektor perkebunan. Setelah itu, dikeluarkanlah Undang-undang Agraria 1870 yang mengakomodasi swasta Belanda

tidaknya makan di rumah orang yang sedang tertimpa kematian, sedekah untuk mayit, *ushalli* (bacaan niat shalat), *talqin* untuk mayit dan lain sebagainya. Terkadang perdebatan dilanjutkan dengan penuh fanatisme seperti yang terjadi di Cirebon, 27-28 Juni 1936. Lihat Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, h. 48

¹⁰ Definisi pembaharu bukan hanya diartikan sebagai sesuatu yang baik atau progresif. Bisa jadi pembaharu di sini diartikan sebagai kelompok puritan yang hendak memurnikan ajaran Islam seperti di masa lalu. Bandingkan dengan Andree Feillard, *NU visa Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, h. 6-7, Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984), h. 5 dan Kacung Marijan, *Quo Vadis NU, Stelah Kembali ke Khittah 1926*, h. 12

¹¹ Greg Fealy, "Wahab Chasbullah, Tradisionalisme dan Perkembangan Politik NU", h. 8

¹² Mustain, *Petani VS Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*, (Yogyakarta: Arruz Media, 2007), h. 14

¹³ Bandingkan dengan Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1500-1900: Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jilid 2 (Jakarta: Gramedia, 1993) dan Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia: Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

berbisnis di Indonesia. Undang-undang 1870 ini mengatur adanya “tanah negara bebas” dan “tanah negara tidak bebas” sehingga mengesankan adanya kebijakan dualisme. Kebijakan ini dalam prosesnya telah mengantarkan para konglomerat Belanda dan Eropa lainnya seperti *Netherlansche Hendels Maatschappij*, *NHM*, yang pada tahun 1915 tidak saja memiliki enam belas pabrik gula dan secara efektif mengontrol dua puluh buah lainnya, plus empat buah pabrik tembakau, dua belas pabrik teh, tetapi juga menguasai empat belas perkebunan karet.¹⁴

Himpitan ekonomi pun semakin parah akibat rakyat Indonesia kehilangan mata pencaharian utamanya sebagai petani. Kebijakan politik ekonomi yang liberal memaksa rakyat Indonesia beralih ke perkebunan. Takashi Shirashi, menyebut perkebunan tebu marak menggantikan tanaman makanan rakyat seperti padi dan palawija.¹⁵ Petani Indonesia terpaksa menjadi buruh dari perkebunan milik pengusaha swasta Belanda.

Di sinilah, Nahdlatut Tujjar didirikan (sebagai embrio dari lahirnya NU) untuk melawan politik ekonomi Kolonial Belanda, hingga dengan jelas dalam deklarasinya menyebut usahanya bergerak dalam bidang pertanian.¹⁶ Bergabung-

nya K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Chasbullah dengan sejumlah masyarakat mendirikan Nahdlatut Tujjar merupakan ekspresi mereka melakukan perlawanan terhadap kebijakan Belanda.

Inilah strategi KH. Hasyim Asy'ari melawan strategi kolonial Belanda yang berusaha melemahkan ekonomi rakyat Indonesia. K.H. Hasyim Asy'ari ketika itu menuntut kepedulian para ulama untuk membangun basis-basis kemandirian ekonomi agar tidak semakin terpuruk dalam kemiskinan, kemaksiatan, dan kebodohan akibat dari kuatnya pengaruh Kolonial Belanda.

Keempat, kesadaran ekonomi yang muncul saat itu lebih cenderung merepresentasikan kesadaran ekonomi subsistem karena tujuan yang ingin diraih adalah agar kebutuhan untuk melakukan reproduksi pengetahuan lewat proses pembelajaran di dalam pesantren dapat terpenuhi. Kesadaran ini juga muncul untuk mempertahankan diri agar kebutuhan akan kitab-kitab yang menjadi acuan utama proses pembelajaran di dalam pesantren bisa dipenuhi tanpa terganggu oleh kemungkinan adanya boikot dari jalur perdagangan kitab. Lebih lanjut kesadaran itu juga menjadi landasan bagi upaya untuk membuka peluang baru, yaitu jalur pemasaran

¹⁴ Mustain, *Petani VS Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*, h. 14

¹⁵ Takashi Shirashi, *Zaman Bergerak; Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2005)

¹⁶ Lihat teks deklarasi Nahdlatut Tujjar yang diterjemahkan Muhammad Miftah (sumber dokumen PP Lakpesdam NU).

kitab-kitab rujukan utama penyebaran dan pemeliharaan faham Ahlussunnah Waljamaah.¹⁷

Dengan penjelasan ini, tampak terlihat adanya hubungan reproduksi pengetahuan dengan sistem ekonomi yang hendak dibangun melalui Nahdlatut Tujar. Dalam konteks ini para ulama tidak ingin kehilangan sumber-sumber utama pengetahuan agama, sehingga mereka bersatu menggerakkan ekonomi. Pertautan antara ekonomi, reproduksi pengetahuan dan sumber pengetahuan agama menjadi penting bagi ulama dalam melestarikan faham Ahlussunnah Waljamaah. Tidaklah cukup para ulama menyebarkan faham Ahlussunnah Waljamaah tanpa adanya ikatan bersama.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah NU berdiri sebagai organisasi Islam pada 1926, muncul aliansi strategis yang dibingkai oleh basis sosial pendirinya, yaitu ulama dan bukan ulama (usahawan kecil yang kebanyakan adalah para pedagang dan tuan tanah).¹⁸ Aliansi ini berlangsung hingga sekarang dalam rangka menopang roda organisasi. Hal ini tampak terlihat dari penyelenggaraan muktamar di masa-masa awal berdirinya NU yang menunjukkan aliansi strategis ini, terutama di muktamar kedua NU dan seterusnya.

Muktamar kedua yang dipusatkan di Hotel Muslimin Peneleh, Surabaya, pada 14-16 Rabiul Tsani 1346 H (9-11 Oktober 1927 M) dihadiri 146 kiai dari Jawa dan Madura serta 242 orang terdiri dari kelompok pengusaha, petani, dan buruh. Muktamar ketiga di Jalan Peneleh Surabaya pada 23-25 Rabiul Tsani 1347 H (28-30 September 1928 M) jumlah pesertanya meningkat menjadi 260 kiai dari 35 cabang NU di Jawa dan Madura. Jumlah ini belum termasuk yang berasal dari pengusaha, buruh, dan pemuda.¹⁹ Kondisi seperti ini terus terjadi di tiap penyelenggaraan muktamar berikutnya; muktamar keempat di Semarang pada 12-15 Rabiul Tsani 1348 H (17-20 September 1929 M), muktamar kelima di Pekalongan pada 13-16 Rabiul Tsani 1349 H (7-10 September 1930 M), muktamar keenam di Cirebon pada 12 Rabiul Tsani 1350 H (9 Agustus 1931 M), hingga K.H. Hasyim Asy'ari tidak lagi menentukan bulan Rabiul Tsani sebagai bulan muktamar, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada peserta muktamar untuk memilih sendiri bulan apa yang disukai.

Dari muktamar ke muktamar, aliansi ulama, pengusaha, pedagang, buruh, dan petani merupakan gambaran yang jelas bahwa NU sejak awal tidak bisa

¹⁷ MM Billah, *Pergolakan NU dan Kelompok Islam: Interplay antara 'Gerakan' dengan 'Gerakan-Tandingan' dan 'Tandingan atas Gerakan Tandingan'* dalam Tashwirul Afkar, Edisi nomor 3 Tahun 1998, h. 52

¹⁸ Lihat teks Lampiran dalam Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*.

¹⁹ Lihat Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, h. 81-86

diabaikan dari komposisi ini. Karena bagaimana pun hingga sekarang, basis terbesar dari jama'ah NU adalah ulama, pedagang, buruh, nelayan, dan petani. Namun Martin van Bruinessen mengkritik aliansi strategis ulama-pedagang dalam NU hanya dalam struktur belaka, tidak menjadi kekuatan yang menggerakkan roda perekonomian jama'ah,²⁰ meskipun sudah banyak didirikan badan ekonomi NU.

Menengok Badan Ekonomi NU

Pada masa-masa awal, NU tidak hanya memusatkan pada perluasan faham dan organisasi, tetapi juga mengurus anak yatim dan fakir-miskin, mendirikan badan-badan untuk memajukan pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tidak dilarang oleh syariat agama Islam.²¹

Dalam Statuennya (AD/ART) Fatsal 3 disebutkan sebagai berikut:

Oentoek mentjapai maksoed perkoempoelan ini maka diadakan ichtiar:

a. Mengadakan perhoeboengan di antara 'Oelama-'oelama jang ber mazhab terseboet dalam fatsal 2 (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali). b. Memeriksa kitab-kitab sebelumja dipakai oentoek mengadjar, soepaja diketahoei apakah itoe dari pada kitab-kitabnja Ahli Soennah Wal ja-ma'ah atau kitab-kitabnja Ahli Bid'ah. c. Me-

njiarkan Agama Islam di atas mazhab sebagai terseboet dalam fatsal 2, dengan djalanan apa sadja jang baik.d. Berichtiar memperbanjakkann Madrasah-Madrasah jang berdasar Agama Islam. e. Memperhatikan hal-hal jang herhoeboengan dengan masjid2, langgar2 dan pondok2, begitoe djoega dengan hal ahwalnja anak-anak jatim dan orang-orang jang fakir miskin. f. Mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan dan peroesahaan, jang tiada dilarang oleh sjara' Agama Islam.

Oleh sebab itu, di dalam perintisan-nya, NU selain mengadakan perhubungan di antara para ulama mazhab untuk mendirikan cabang-cabang NU, generasi pendiri organisasi ini juga berusaha memperhatikan masalah-masalah sosial, kemasyarakatan, pendidikan, dan juga dakwah.²²

Di bidang sosial ekonomi, NU berusaha mendirikan koperasi serba ada. Misalnya, pada 1929 di Surabaya (berpusat di Pacarkeling) didirikan *Cooperative Kaum Muslimin (CKM)*, perkumpulan usaha. Pelopor pendiri *syirkah tijariyah* ini adalah K.H. Abdul Halim, salah seorang pengurus *Hoofdbestuur* NU. Barang-barang yang mulai diperjualbelikan ketika itu berupa kebutuhan primer (keperluan

²⁰ Martin van Bruinessen, *Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, h. 39

²¹ Lihat Anggaran Dasar NU, pasal 3.

²² Lihat Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, h. 89

sehari-hari) seperti beras, gula, kopi, roko, pasta gigi, sabun, kacang, minyak, dan sebagainya. Namun yang menarik dari usaha ini adalah peraturan dasar CKM yang kala itu sudah disahkan sebagai model koperasi NU di tempat-tempat lain. Ini pertanda langkah awal menuju sosial ekonomi sudah mulai terlihat di tahun 1929. Peraturan CKM mengenai pembagian keuntungan, misalnya dibagi lima bagian: 40 persen untuk pegawai (penjual), 15 persen untuk pemilik modal, 25 persen untuk menambah kapital (berarti pemilik modal mendapat bagian 40 persen), 5 persen untuk juru komisi (juru tulis) dan 15 persen untuk jam'iyah NU.²³

Pada tahun 1938-1939, sebagai suatu gerakan keagamaan, NU membuat kegiatan yang besar artinya pada kebangunan semangat di bidang perekonomian. Gerakan itu disebut *Moment-actie* Gerakan *Mabadi Khairo Ummah* yang mengarah semangat tolong-menolong (*mu'awanah*) di lapangan ekonomi bangsa, dengan meningkatkan pendidikan moral yang bertumpu pada tiga prinsip, yaitu jujur (*sidq*), amanah (dapat dipercaya) dan tolong-menolong (*ta'awun*).²⁴

Diceritakan oleh K.H. Muhith Muzadi, pada kurun waktu antara tahun 1935-1940, K.H. Mahfudz Siddiq, ketika

menjabat *Voorzitter Hoorfdebestuur* Nahdlatul Ulama (Ketua PBNU), melancarkan kampanye (anjuran yang dilakukan dengan serius, terus-menerus dan terarah khusus) untuk terwujudnya pelaksanaan tiga akhlak oleh kaum muslimin umumnya dan kaum Nahdiyyin khususnya. Tiga butir akhlak ini dipilih dengan pertimbangan bahwa ketiganya sangat strategis sebagai landasan pertama bagi terbinanya "Umat Terbaik" (*khairo ummah*). Bersama-sama dengan tokoh muda (generasi kedua) Nahdlatul Ulama seperti: K.H. Thahir Bakri, K.H. Abdullah Oebaid, K.H.A. Wahid Hasyim, dan di bawah bimbingan para sesepuh seperti K.H. M. Hasyim Asy'ari, K.H.A. Wahab Chasbullah, K.H.R. Asnawi, K.H. Bisri Syansuri, dan tokoh generasi pertama Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama berada pada kedudukan yang sangat terhormat.²⁵

Dalam gerak konkretnya, K.H. Mahfudz Siddiq mendirikan koperasi *syirkah mu'awwanah* (1937). Kehadiran koperasi ini berupaya membuka jaringan perdagangan antarpesantren yang banyak menghasilkan produk-produk pertanian dan usaha-usaha kecil lainnya.

Dalam pada itu, terdapat satu departemen dari lima departemen yang ada, dan secara khusus mengurus masalah

²³ Lihat Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, h. 93

²⁴ Sahal Mahfudz, "Pendahuluan", dalam Kacung Marijan, *Quo Vadis NU, Stelah Kembali ke Khittah 1926*, h. xiii

²⁵ KH. Muchith Muzadi, "Mabadi Khoiro Ummah", makalah Program Peningkatan Peran Syuriah Nahdlatul Ulama (P2SNU), Lakpesdam-LBM Juni 2007

bisnis di dalam NU.²⁶ Para anggota yang memproduksi barang-barang sederhana seperti pakaian, rokok, sajadah, dan lain-lain diperkenankan memasarkan barangnya dengan nama “Nahdlatul Ulama”, dengan menggunakan lambang resmi NU. Sebagai imbalannya mereka harus memberikan persentase keuntungannya kepada organisasi, dan semua label harus dicetak di percetakan milik NU sendiri. Kiai didorong mendirikan toko sendiri, dengan logo NU, untuk menjual barang-barang yang diperlukan di pesantren. Departemen ini akan membantu mereka mengembangkan keterampilan bisnis mereka, dan para usahawan didorong menjual barang-barang mereka ke toko-toko ini dengan persyaratan yang lebih mudah.

Namun pada kenyataannya *syirkah mu'awwanah* dan departemen yang mengurus bisnis di NU ini tidak mampu berperan secara maksimal dalam mengangkat perekonomian umat.

Selanjutnya, Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo yang fenomenal itu bukan saja melahirkan gerakan “aqidah politik”, menjauh dari kekuasaan, tapi juga berhasil menguatkan “aqidah ekonomi” NU yang sudah digagas di awal pendirian NU. Dari delapan poin “aqidah

ekonomi” NU yang dituangkan sebagai hasil Muktamar ke-27, ada tiga kata kunci yang patut dipahat dengan kuat.²⁷

Pertama adalah asas kemandirian. Poin ini dijelaskan dengan baik bahwa akibat dari urbanisasi besar-besaran, perlu disusun pemikiran-pemikiran (ekonomi) makro yang berorientasi dengan perekonomian nasional. *Kedua*, NU tetap mendorong peningkatan industri kecil di pedesaan. Hal ini muncul atas kesadaran bahwa bagaimana pun, basis sosiologi warga NU berada di pedesaan. Dan NU juga menilai bahwa pedesaan adalah kekayaan kultural yang musti dikembangkan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Ketiga adalah asas solidaritas ekonomi. Solidaritas ekonomi ini berkaitan dengan semakin menguatnya perusahaan-perusahaan raksasa. Dengan



²⁶ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, lihat teks Lampiran.

²⁷ PBNU, *Hasil-hasil Muktamar NU ke-27 Situbondo*, tanpa tahun.

segala tenaga dan tipu daya yang dimilikinya, perusahaan-perusahaan raksasa mendominasi potensi ekonomi lokal yang memang tidak berdaya. Solidaritas ekonomi dimaksudkan menghilangkan jurang ekonomi kuat dengan ekonomi lemah. Solidaritas ekonomi ini disyia'arkan untuk mewujudkan konsep ekonomi Pancasila. Dan tidak lupa, bahwa NU menjadikan agama sebagai motivator pergerakan ekonomi.

Bidang ekonomi di atas diperkuat dengan bidang pertanian dan perikanan, serta bidang ketenagakerjaan, yang juga tak kalah visioner. Namun sayang, "aqidah ekonomi" belum terwadahi dalam program yang implementatif. Dan inilah kelemahan NU. Oleh karenanya, menjadi otomatis tidak ada perkembangan yang signifikan dalam gerakan ekonomi di ormas Islam terbesar di negeri ini.

Baru di Muktamar ke-28 yang berlangsung di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta tahun 1989, ada keputusan pengembangan ekonomi yang relatif fokus dan jelas, yakni pengembangan koperasi. Keputusan ini merujuk pada hasil dari jawaban cabang-cabang yang menghadiri muktamar. Para pengurus NU di tingkat cabang mengeluhkan bahwa pengusaha-pengusaha kecil di daerah terkendala oleh langkanya modal segar untuk mengembangkan usaha.²⁸ Dan sebagai organisasi yang taat pada konstitusi negara, NU memutuskan untuk mengembangkan ekonomi yang

mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945. PBNU menyerukan agar diupayakan pendirian koperasi di tingkat wilayah dan cabang, dan pesantren-pesantren ataupun sekolah-sekolah di lingkungan NU, sesuai dengan kebutuhan kondisi setempat.²⁹

Di level PBNU sendiri, Gus Dur, yang terpilih lagi secara aklamasi di Muktamar Krapyak tahun 1989, berhasil menggaet pengusaha Edward Soeryadjaya untuk berkongsi mendirikan bank bernama BPR Nusumma. Penandatanganan antara PBNU dengan Bank Summa dilakukan pada tanggal 1 Juni 1990. Selang beberapa bulan BPR Nusumma mulai beroperasi di sembilan tempat, Tebuireng-Jombang, Gondanglegi-Malang, Jatiroto, Kedungwuni-Pekalongan, Pecangaan-Jepara, Talang-Tegal, Tempel-Sleman, Sawangan-Depok, dan Cisalak-Subang.

Bank yang dibangun Abdurrahman Wahid ini adalah bukan bank tanpa bunga, tetapi bank kredit dan tabungan biasa. Bank tersebut dimaksudkan untuk melayani kredit para pengusaha kecil dan diharapkan menarik tabungan dari sejumlah pengikut NU yang sejauh ini lebih senang menyimpan uang mereka "di bawah bantal" daripada menyimpannya di bank.

Bunga bank sebagaimana diketahui merupakan isu sensitif karena ada beragam pendapat para ulama. Namun dalam kasus ini, kebanyakan ulama NU

²⁸ Wawancara dengan H. Mustofa Zuhad Mugni di PBNU, 8 Oktober 2009.

²⁹ PBNU, Keputusan Muktamar NU ke-28.

menyetujui. Sebelumnya pada tahun 1950-an para pengurus NU mendirikan Bank Nusantara di Jakarta dan Bank Haji di Semarang. Kedua bank tersebut mengalami kegagalan karena manajemen yang lemah.³⁰ Abdurrahman Wahid mendekati dunia bisnis Cina dan mengusulkan pembentukan komite bersama untuk memikirkan cara yang menguntungkan untuk menyalurkan kemampuan dan dana kepada pengusaha pribumi berskala kecil. Keputusan untuk bekerja sama dengan menggunakan modal Cina yang besar diramalkan akan mendapatkan tantangan dalam Syuriah. Meskipun begitu, kritik-kritik tersebut tetap lunak karena program tersebut melayani kebutuhan yang benar-benar dirasakan di kalangan NU.³¹

Dalam catatan resmi yang dikeluarkan oleh PT Nusumma Utama, pendirian bank-bank kecil di pedesaan merujuk pada realitas warga NU yang mayoritas bergerak di bidang usaha mikro, pertanian, perikanan, perkebunan, manufaktur, dan lain-lain. BPR juga dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan lalu-lintas keuangan di desa ataupun pesantren untuk menabung, dan lain-lain.

Dalam literatur fiqih, bunga bank "dihukumi" ikhtilaf. Kalaupun ada yang berpendapat haram, itu pun tidak mutlak, karena ada yang menilai syubhat,

bahkan mubah saja. Itu artinya, tidak ada problem dari sisi ajaran fiqih. Oleh sebab itu, BPR Nusumma melanggang ringan. Gus Dur bahkan optimis, dalam sepele tahun setelah pendirian, BPR Nusumma akan menjadi dua ribu unit, dengan prediksi mampu melayani dua ratus ribu pengusaha kecil di desa-desa lumbung warga NU.

Namun sayang seribu sayang, dua tahun setelah pendirian, Bank Summa yang menjadi induk BPR Nusumma rontok. Bank Summa dilikuidasi tanggal 13 Nopember 1992, tak lama setelah BPR bertambah satu unit, yakni BPR Nusumma Ceper di Klaten, Jawa Tengah. Tapi untung, dia tidak limbung, lantaran Jawa Pos Group bersedia gabung, menggantikan posisi Bank Summa.

Bersama Jawa Pos Group, hingga tahun 1998, BPR Nusumma bertambah menjadi 15 unit. Pertumbuhan BPR Nusumma tidak membanggakan. Tapi juga boleh dibilang cukup "tegar" berdiri ketika mampu bertahan dari hempasan krisis moneter dan krisis ekonomi 1997. Lebih-lebih, menurut pengakuan Musthafa Zuhad --pengawal gerakan BPR Nusumma-- PBNU tidak cukup memberikan perhatian kepada Nusumma. Kenyataan itu terjadi mulai periode Gus Dur (1984-1999) sendiri --yang *notebene* inisiator berdirinya BPR--hingga menje-

³⁰ Martin van Bruinessen, "Perjuangan Meraih Kekuasaan dan Keprihatinan Sosial: Catatan Muktamar Krapyak", dalam Greg Fealy dan Greg Barton (ed.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, h. 134.

³¹ Martin van Bruinessen, "Perjuangan Meraih Kekuasaan dan Keprihatinan Sosial", h. 135

lang akhir kepemimpinan K.H. Hasyim Muzadi (1999-2009).³² Tentu pengakuan Musthafa ini sungguh mengherankan, karena dia sendiri adalah salah seorang Ketua PBNU 2004-2009.

Tapi, di tengah kordinasi yang tidak jelas di antara pejabat teras PBNU, BPR Nusumma masih memiliki optimisme yang kuat. Diharapkan, ke depan BPR Nusumma dapat bersinergi dengan instansi-institusi keuangan lain yang masih di bawah payung NU, seperti BMT dan koperasi simpan pinjam yang dikembangkan oleh Lembaga Perekonomian Nadlatul Ulama (LPNU).³³ Yang layak disebut lagi, karena menjadi kelebihan dari BPR Nusumma saat ini adalah kaderisasi dan loyalitas para karyawan cukup mapan. Saat ini, Nusumma memiliki tidak kurang dari 170 karyawan yang tersebar di 12 kantor BPR. Mereka berpendidikan SLTA hingga S2. Saat ini BPR Nusumma memiliki aset tidak kurang dari 46 milyar rupiah.

Menurut laporan tim BPR Nusumma pada September 2008, pengguna jasa terdiri dari 24.262 nasabah penabung atau deposito, 5.324 nasabah peminjam dengan mayoritas peminjam Kredit Modal Kerja (KMK). Ini artinya, apabila terdapat 40 juta warga NU pada bulan September 2008 total nasabah penabung baru mencapai 0.30% (belum mencapai 1%) dari 20% warga atau 0.06% (belum

mencapai 0.1%) dari total warga NU. Dan ini artinya, BPR Nusumma adalah salah satu pekerjaan rumah yang patut menjadi skala prioritas kepengurusan NU ke depan.

Tapi syukurlah, banom-banom NU baik di tingkat pusat hingga tingkat cabang, bahkan kecamatan memiliki inisiatif-inisiatif dan partisipasi yang luar biasa terhadap kesadaran dalam melakukan pemberdayaan ekonomi warganya. Dan peran pesantren dalam memainkan peran-peran ekonomi harus dapat diapresiasi.

Selain itu, yang patut disajikan sebagai contoh adalah Koperasi Pemuda Buana (Kopena) di Kota Pekalongan. Koperasi yang diupayakan oleh PC GP Anshor Kota Pekalongan ini telah berdiri sejak tahun 1993 dengan modal utama empat ratus ribu rupiah. Usaha Kopena meliputi jasa simpan pinjam, jasa pelayanan haji, umroh dan jasa kontruksi.

Sampai sekarang ini, dengan aset 12 milyar, Kopena telah berhasil merekrut anggota sekitar 661 orang dan calon anggota sejumlah 5 ribuan lebih. Dari jumlah anggota dan calon anggota ini, didominasi oleh para pedagang dan pengusaha mikro dan menengah yang usaha sehari-harinya bergerak di sektor riil dan informal. Adalah Saelany Machfudz salah seorang yang ulet mengurus Kopena. Kesuksesannya mengelola ba-

³² Wawancara dengan H. Ir. Musthafa Zuhad di PBNU, 8 Oktober 2009

³³ www.nu.or.id, 26 Mei 2007, BPR Nusumma Targetkan Miliki 80 Outlet pada 2012.

dan ekonomi berbuah dua penghargaan yang bergengsi di bidang koperasi tingkat nasional, yaitu Satya Lencana Wira Karya pada tahun 2009 dan Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 1999.³⁴

Dari rentetan perjalanan NU dalam menggerakkan ekonomi semenjak Nahdlatut Tujjar hingga sekarang nampaknya tidak banyak berkembang. MM Billah melukiskan fenomena ini dengan baik, "Kalau Tashwirul Afkar bisa dianggap sebagai cikal bakal dan titik berangkat dari Syuriah, dan Nahdlatul Wathan sebagai bibit dan titik tolak dari peran Tanfidziyah, maka kuncup Nahdlatut Tujjar patah sebelum tumbuh menjadi tunas yang subur di dalam struktur organisasi NU".

Jadi kesadaran ekonomi yang telah ada ternyata tidak ditransformasikan ke dalam tubuh organisasi NU. Hal ini pada satu sisi memberi tanda bahwa NU sama sekali tidak mau memberi perhatian pada masalah ekonomi warganya, atau pada sisi lain NU menyerahkan sepenuhnya urusan ekonomi itu kepada setiap warganya, atau pada tataran *societal*, NU

secara sadar atau tidak, lebih percaya pada kekuatan *the invisible hand* pasarlah yang mengatur perputaran ekonomi. Jika hal yang terakhir ini yang benar, maka tidaklah mengherankan sama sekali jikalau NU tidak peka dan tidak tanggap atas praktek eksploitasi ekonomi (pasar), baik pada tingkat *societal* (yakni sistem ekonomi yang eksploitatif) maupun pada tataran ekonomi mikro dalam hubungan antara majikan kapitalis dengan buruh.³⁵

Namun demikian, NU sebagai organisasi sosial keagamaan bukan tinggal diam dengan eksploitasi ekonomi pasar yang telah menindas jama'ahnya karena NU terus-menerus melakukan serangkaian pemikiran untuk merevitalisasi semangat Nahdlatut Tujjar agar terbebas dari belenggu penindasan ekonomi dalam bentuknya yang paling modern, meskipun terkadang tak kuasa menahan derasnya serangan dari luar. Di sinilah, NU perlu melakukan terobosan guna menahan laju himpitan ekonomi pasar yang semakin tak terkendali. (Khamami Zada dan Hamzah Sahal[]

³⁴ <http://www.nubatik.net/content/view/840/>

³⁵ MM Billah, Pergolakan NU dan Kelompok Islam: Interplay antara 'Gerakan' dengan 'Gerakan-Tandingan' dan 'Tandingan atas Gerakan Tandingan' dalam Tashwirul Afkar, Edisi nomor 3 Tahun 1998, h. 54